

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi jabatan untuk memperoleh nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*) bagi kelas jabatan Auditor dan Widyaiswara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Menimbang :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 603);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 603), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal II

1. Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini dibayarkan terhitung sejak pejabat/pegawai diangkat ke dalam jabatan tersebut.
2. Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan
Keuangan LKPP,



John Piter Halomoan

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
1	2	4
1	Sekretaris Utama	16
2	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	15
3	Kepala Bagian Program dan Anggaran	12
4	Kepala Subbagian Program	9
5	Kepala Subbagian Anggaran	9
6	Kepala Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	12
7	Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I	9
8	Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja II	9
9	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12
10	Kepala Subbagian Organisasi	9
11	Kepala Subbagian Tata Laksana	9
12	Kepala Biro Umum dan Keuangan	15
13	Kepala Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	12

No	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
1	2	4
14	Kepala Subbagian Pengadaan	9
15	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9
16	Kepala Bagian Keuangan	12
17	Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan	9
18	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran	9
19	Kepala Bagian Tata Usaha, Kearsipan dan Rumah Tangga	12
20	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan	9
21	Kepala Subbagian Rumah Tangga	9
22	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	15
23	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	12
24	Kepala Subbagian Hukum	9
25	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	9
26	Kepala Bagian Sistem Informasi	12
27	Kepala Subbagian Data dan Informasi	9
28	Kepala Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi	9
29	Kepala Bagian Kepegawaian	12
30	Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi	9
31	Kepala Subbagian Pengembangan	9
32	Deputi bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	16
33	Direktur Pengembangan Strategi dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Umum	15
34	Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Umum	12
35	Kepala Seksi Pengkajian Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	9
36	Kepala Seksi Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	9
37	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum	12
38	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Umum	9

No	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
1	2	4
39	Kepala Seksi Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum	9
40	Direktur Pengembangan Strategi dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Khusus	15
41	Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus	12
42	Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus I	9
43	Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus II	9
44	Kepala Subdirektorat Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus	12
45	Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus I	9
46	Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus II	9
47	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	15
48	Kepala Subdirektorat Iklim Usaha	12
49	Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha	9
50	Kepala Seksi Kesempatan Usaha	9
51	Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional	12
52	Kepala Seksi Multilateral	9
53	Kepala Seksi Bilateral	9
54	Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pengadaan	16
55	Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan	15
56	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengadaan	12
57	Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga	9
58	Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah	9
59	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan	12
60	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga	9

No	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
1	2	4
61	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah Daerah	9
62	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	15
63	Kepala Subdirektorat Pengembangan Kebijakan dan Monitoring Evaluasi Sistem Katalog	12
64	Kepala Seksi Kebijakan Katalog	9
65	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Katalog	9
66	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Nasional	12
67	Kepala Seksi Prakatalog	9
68	Kepala Seksi Pasca Katalog	9
69	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	15
70	Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi	12
71	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE	9
72	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE	9
73	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12
74	Kepala Seksi Layanan Dukungan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik	9
75	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9
76	Deputi bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia	16
77	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	15
78	Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan	12
79	Kepala Seksi Standar kompetensi	9
80	Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan	9
81	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan	12
82	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan	9
83	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan	9
84	Direktur Sertifikasi Profesi	15

No	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
1	2	4
85	Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi	12
86	Kepala Seksi Sistem Sertifikasi	9
87	Kepala Seksi Sarana Sertifikasi	9
88	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Sertifikasi	12
89	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional	9
90	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat Fungsional	9
91	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	16
92	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	15
93	Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	12
94	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	9
95	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	9
96	Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang Kemaritiman	12
97	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian	9
98	Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Kemaritiman	9
99	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	15
100	Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah Barat	12
101	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat I	9
102	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat II	9
103	Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah Timur	12
104	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur I	9
105	Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur II	9
106	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	15
107	Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Kontrak	12
108	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Barat	9

No	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
1	2	4
109	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Timur	9
110	Kepala Subdirektorat Dukungan Penegakan Hukum	12
111	Kepala Seksi Pengelolaan Keterangan Ahli Pengadaan	9
112	Kepala Seksi Pengelolaan Pengaduan	9
113	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ	15
114	Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi	12
115	Kepala Subbidang Program dan Kurikulum	9
116	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi	9
117	Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	12
118	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis	9
119	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	9
120	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdiklat PBJ	9
121	Inspektur	15
122	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	9

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 R. Lingkup & Pengaruh (Level 1~5)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1~5)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level :1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
1	PENGEMUDI	3	370	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	2	20	2	20
2	ARSIPARIS PELAKSANA	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5

3	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7	855	4	550	2	125	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
4	PENGADMINISTRASI UMUM	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
5	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	PENGADMINISTRASI SERTIFIKASI	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	PENGELOLA	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
8	PENGOLAH DATA	6	755	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	1	5	1	5
9	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	PENYUSUN BAHAN	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
11	PENYUSUN LAPORAN BMN	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
12	PENATA KEUANGAN	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
13	PERENCANA PERTAMA	8	1110	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
14	PERENCANA MUDA	9	1460	5	750	3	275	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
15	PERANCANG PERATURAN PER-UU PERTAMA	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
16	PERANCANG PERATURAN PER-UU MUDA	9	1495	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
17	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	1110	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5

18	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9	1460	5	750	2	275	2	125	2	75	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
19	PRANATA HU MAS PERTAMA	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
20	PUSTAKAWAN PERTAMA	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
21	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	790	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
22	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	890	4	550	2	125	1	.25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
23	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
24	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	1195	5	750	2	125	1	25	3	150	2	75	1	10	2	50	1	5	1	5
25	PRANATA KOMPUTER MUDA	9	1460	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
26	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
27	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	8	1105	5	750	2	125	1	25	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
28	WIDYAIKWARA UTAMA	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5
29	WIDYAIKWARA MADYA	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
30	WIDYAIKWARA MUDA	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
31	WIDYAIKWARA PERTAMA	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
32	AUDITOR UTAMA	13	2485	6	950	4	450	4	450	5	325	4	255	2	25	1	20	1	5	1	5

33	AUDITOR MADYA	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
34	AUDITOR MUDA	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
35	AUDITOR PERTAMA	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO